



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023



PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **H. Bambang Myanto, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun IV (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100
		2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100
		3. Persentase perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang diselesaikan tepat waktu.	100
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	45
		5. Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan.	3,72
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100
		3. Persentase salinan putusan perkara Pidana Khusus (Tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100
3	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	1. Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun IV (2023)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Palangkaraya	1. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Bidang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.	96
		2. Jumlah pelaksanaan Pengawasan Daerah se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya	11
		3. Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100

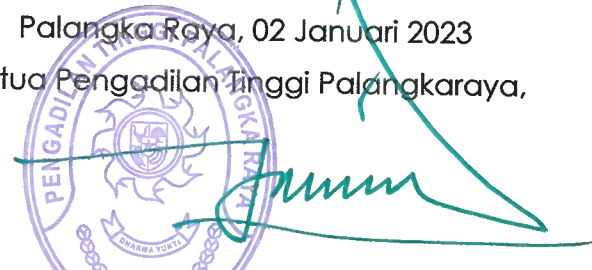
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 25.447.279.000	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 220.090.000	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
3.	Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Banding	Rp. 150.000/Perkara	-

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Palangka Raya, 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya,



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001